

ANALISIS *FRAMING* KONFLIK EKONOMI–EKOLOGI DALAM PEMBERITAAN PT GAG NIKEL RAJA AMPAT DI KUMPARAN.COM DAN TEMPO.CO

Devita Citra Maesya

Universitas Singaperbangsa Karawang
2310631190075@student.unsika.ac.id

Nurkinan

Universitas Singaperbangsa Karawang
nurkinan@fisip.unsika.ac.id

Tri Susanto

Universitas Singaperbangsa Karawang
tri.susanto@staff.unsika.ac.id

ABSTRAK

Eksploitasi sumber daya alam di Indonesia kerap menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini menganalisis bagaimana Kumparan.com dan Tempo.co membingkai konflik ekonomi–ekologi terkait izin operasi kembali PT Gag Nikel di Raja Ampat, wilayah yang dikenal dengan keanekaragaman hayatinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis *framing* Robert N. Entman yang meliputi empat elemen: pendefinisian masalah (*problem definition*), identifikasi penyebab (*causal interpretation*), penilaian moral (*moral evaluation*), dan rekomendasi solusi (*treatment recommendation*). Data dikumpulkan melalui *purposive sampling* terhadap berita yang dipublikasikan pada 3–15 September 2025. Hasil menunjukkan bahwa Kumparan.com menyoroti legitimasi prosedural dan kepatuhan regulasi, sedangkan Tempo.co menonjolkan dampak ekologis dan pengabaian terhadap masyarakat adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media berfungsi sebagai arena kontestasi wacana antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: *Analisis framing; Media; Konflik ekonomi–ekologi; Raja Ampat; Gag nikel*

ABSTRACT

Natural resource exploitation in Indonesia often creates tension between economic interests and environmental sustainability. This study analyzes how Kumparan.com and Tempo.co frame the economic–ecological conflict surrounding the reopening of PT Gag Nickel in Raja Ampat, an area known for its marine biodiversity. Using a qualitative approach, this research applies Robert N. Entman’s framing analysis, which includes four elements: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Data were obtained through purposive sampling of news articles published between September 3 and 15, 2025. The findings show that Kumparan.com emphasizes procedural legitimacy and regulatory compliance, while Tempo.co adopts a critical frame highlighting ecological damage and the neglect of indigenous rights. The study concludes that media serve as a site of discourse contestation between development and sustainability.

Keywords: *Framing analysis; Media; Economic–ecological conflict; Raja Ampat; Gag nickel*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan proporsi wilayah laut yang jauh melampaui daratannya. Secara geografis, negara ini terdiri atas sekitar 17.508 pulau dengan garis pantai yang mencapai kurang lebih 81.000 kilometer. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat beragam. Secara umum, sumber daya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui—seperti perikanan, ekosistem mangrove, dan terumbu karang—serta sumber daya yang tidak dapat diperbarui, seperti bahan tambang. Selain itu, kawasan pesisir berperan sebagai zona transisi antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai strategis, baik dari aspek ekonomi maupun ekologi (Diva Khairunnisa and Sarjan 2025). Dalam konteks pembangunan nasional, wilayah pesisir dan laut tidak hanya berfungsi sebagai basis kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ekosistem penting yang menopang keberlanjutan kehidupan masyarakat. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan.

Salah satu kawasan yang merefleksikan kompleksitas hubungan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah Kabupaten Raja Ampat, yang terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah ini dikenal secara global sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis sekaligus destinasi wisata bahari berkelas dunia (Atong 2025). Keindahan alam serta kekayaan ekosistemnya menjadikan Raja Ampat tidak hanya sebagai ikon ekowisata nasional, tetapi juga sebagai laboratorium alami bagi upaya konservasi kelautan. Di samping potensinya sebagai kawasan konservasi dan pariwisata, Raja Ampat juga berada dalam konteks kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan sumber daya mineral strategis, termasuk nikel. Kekuatan cadangan nikel Indonesia mencapai 55.000.000 ton (USGS, 2024) yang memainkan peran penting dalam sektor perdagangan antarnegara, khususnya dalam menyikapi meningkatnya permintaan nikel global. Besarnya cadangan tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu aktor utama dalam rantai pasok nikel dunia dan mendorong pengembangan aktivitas pertambangan di berbagai daerah (Media et al. 2025). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan investasi di sektor pertambangan nikel melalui pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada berbagai perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu wilayah yang memiliki potensi cadangan nikel adalah Pulau Gag yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Pulau tersebut menjadi lokasi berlangsungnya aktivitas pertambangan nikel yang dikelola oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (Putra 2025). Namun, dibalik citra ekologis dan pariwisata yang kuat, kawasan ini menghadapi tekanan serius dari aktivitas ekonomi ekstraktif, khususnya pertambangan nikel di Pulau Gag. PT Gag Nikel memperoleh izin operasi pada akhir tahun 2017 dan memulai produksi pada sekitar tahun 2018. Operasional perusahaan sempat dihentikan pada Juni 2025 akibat

penolakan sejumlah pihak yang menyoroti potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Meski demikian, pada 3 September 2025, izin operasi kembali dikeluarkan dengan persyaratan kepatuhan lingkungan yang lebih ketat. Di sisi lain, ekspansi kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian ekosistem laut dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekitar. Berbagai organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), menyoroti potensi dampak yang ditimbulkan serta mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan terhadap izin tambang di kawasan konservasi dan memperkuat pengawasan lingkungan (Syahra et al. 2025). Dinamika kebijakan ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara dorongan pembangunan ekonomi yang menjanjikan investasi serta lapangan kerja, dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi karakter utama kawasan konservasi dunia seperti Raja Ampat. Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika kebijakan pengelolaan sumber daya di Raja Ampat tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memicu perdebatan publik yang luas.

Dinamika kebijakan tersebut memunculkan berbagai respons dari masyarakat lokal, komunitas adat, organisasi lingkungan, hingga para aktivis yang mempertanyakan dasar legitimasi keputusan pemerintah. Konflik yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi dan ekologi, tetapi juga mencerminkan persoalan dalam komunikasi kebijakan publik yang menuntut adanya transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Dalam konteks ini, media massa memainkan peran sentral sebagai ruang publik tempat terbentuknya opini dan konstruksi makna sosial. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, melainkan juga sebagai agen konstruksi realitas melalui mekanisme seleksi, penonjolan, dan interpretasi terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai konflik pertambangan nikel di Raja Ampat dapat dipahami sebagai arena kontestasi wacana, dimana berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan berinteraksi serta saling berhadapan dalam ruang representasi media. Dalam konteks inilah, analisis terhadap bagaimana media membingkai isu menjadi penting untuk memahami arah wacana publik yang terbentuk.

Pendekatan framing merupakan salah satu perspektif analitis yang digunakan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas sosial melalui proses seleksi, penonjolan, dan penyajian informasi. Entman (1993) menjelaskan bahwa framing terdiri atas empat komponen utama, yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*), penentuan penyebab (*causal interpretation*), penilaian moral (*moral evaluation*), dan rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*). Melalui keempat dimensi tersebut, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara pandang khalayak terhadap suatu peristiwa. Sejalan dengan itu, (Eriyanto 2002) menyatakan bahwa analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media mendefinisikan realitas, menentukan aktor yang dianggap penting, serta membangun sudut

pandang tertentu terhadap sebuah isu. Sobur (Sobur 2001) menjelaskan bahwa teks media bukan sekadar sarana penyampaian informasi, melainkan representasi realitas yang telah melalui proses konstruksi makna. Oleh karena itu, setiap pemberitaan dapat mengandung sudut pandang tertentu yang memengaruhi cara khalayak memahami suatu peristiwa. Dengan demikian, framing dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas sehingga informasi yang disampaikan memperoleh makna tertentu bagi khalayak. Karena berita tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya, pesan yang disampaikan media juga dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, khalayak dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap peristiwa yang sama sesuai dengan bingkai yang dibangun media (Hafidli et al. 2023). Dalam konteks konflik pertambangan nikel, cara media membingkai isu dapat merefleksikan orientasi terhadap kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, maupun agenda politik tertentu. Oleh karena itu, analisis framing berperan penting untuk mengungkap bagaimana nilai ideologis dan kecenderungan redaksional tersembunyi dalam struktur pemberitaan yang dibangun media.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas bagaimana media mengonstruksi isu pertambangan dan konflik lingkungan di Indonesia. (Media et al. 2025) meneliti pemberitaan terkait tambang nikel di Raja Ampat melalui Kompas.com dan menemukan bahwa media tersebut lebih banyak menonjolkan bingkai kebijakan pemerintah dibandingkan dengan representasi suara masyarakat lokal. Temuan serupa juga diungkap oleh (Dwita, Pramudya, and Sukmawati 2023) yang meneliti pemberitaan mengenai kasus PT Medco di Aceh pada AJNN.net; hasilnya menunjukkan kecenderungan penggunaan bingkai human interest yang menempatkan masyarakat terdampak sebagai pusat narasi serta menampilkan kritik terhadap pihak korporasi. Sementara itu, penelitian oleh (Nuri, Afrizal Tjoetra, and Fahrimal 2024) mengenai konflik Pulau Rempang mengungkap adanya perbedaan strategi bingkai antara Detik.com dan CNN Indonesia—di mana Detik.com lebih berfokus pada sudut pandang kebijakan pemerintah, sedangkan CNN Indonesia menonjolkan resistensi warga terhadap proyek tersebut. Secara umum, rangkaian studi ini menegaskan bahwa konstruksi media terhadap isu-isu lingkungan sangat dipengaruhi oleh ideologi redaksi, kedekatan media dengan sumber informasi, serta strategi komunikasi yang diterapkan dalam proses pemberitaan. Kendati demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada satu media atau satu kasus tertentu sehingga belum banyak mengungkap perbandingan konstruksi realitas antara media dengan karakteristik redaksional yang berbeda pada isu pertambangan nikel di Raja Ampat.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah mengulas konstruksi media terhadap isu pertambangan dan lingkungan, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara spesifik membandingkan bagaimana dua media arus utama nasional, Kumparan.com dan Tempo.co, membingkai konflik tambang nikel di Raja Ampat. Kedua media tersebut menarik untuk diteliti

karena memiliki karakteristik jurnanisme yang berbeda. Kumparan.com dikenal dengan pendekatan storytelling dan jurnanisme partisipatif berbasis digital, sedangkan Tempo.co berakar pada tradisi jurnanisme investigatif yang cenderung kritis terhadap kekuasaan. Perbedaan orientasi dan nilai redaksional tersebut berpotensi memunculkan konstruksi pemberitaan yang berbeda terhadap isu yang sama. Oleh karena itu, penelitian komparatif diperlukan untuk mengungkap bagaimana masing-masing media membingkai konflik tambang nikel di Raja Ampat dalam konteks ideologi, kepentingan, dan orientasi jurnanisme mereka.

Bertolak dari latar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola *framing* yang digunakan oleh masing-masing media dalam pemberitaan mengenai konflik tambang nikel PT Gag di Raja Ampat, serta mengidentifikasi perbedaan konstruksi berita yang dihasilkan keduanya. Analisis dilakukan dengan menggunakan model *framing* Entman (1993) melalui pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif terhadap berita yang dipublikasikan pada periode 3–15 September 2025.

Secara teoritis, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi lingkungan dan jurnanisme konstruktivis, khususnya dalam memahami bagaimana bingkai media berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu yang melibatkan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi jurnalis, pengelola media, serta pembuat kebijakan untuk lebih mempertimbangkan prinsip keberimbangan, keberlanjutan, dan keadilan lingkungan dalam proses produksi serta penyajian berita. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *framing* media dalam isu lingkungan sekaligus memberikan pemahaman mengenai bagaimana media membangun konstruksi realitas yang berbeda terhadap konflik ekonomi–ekologi di Raja Ampat.

B. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dalam ranah Ilmu Komunikasi yang menggunakan metode analisis *framing* berdasarkan model Entman (1993). Model ini banyak digunakan dalam studi kontemporer, misalnya oleh (Nuri et al. 2024) yang membuktikan relevansinya dalam kajian media dan isu ekologi. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap cara media mengonstruksi realitas dengan menekankan aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya. Sumber data penelitian diperoleh dari pemberitaan daring yang dipublikasikan oleh Kumparan.com dan Tempo.co, keduanya merupakan media arus utama nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *purposive sampling*, yakni pemilihan berita secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan isu konflik ekonomi–ekologi tambang nikel Raja Ampat. Kriteria berita yang dipilih mencakup teks yang memuat dimensi ekonomi, ekologi, kebijakan pemerintah, serta respons masyarakat atau organisasi sipil. Bahan analisis dibatasi pada berita yang terbit sejak 3 hingga 15 September 2025, bertepatan dengan mencuatnya kembali polemik tambang

PT Gag Nikel pasca-pemberian izin operasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan empat elemen framing Entman, yaitu (1) pendefinisian masalah (*problem definition*), (2) identifikasi penyebab (*causal interpretation*), (3) penilaian moral (*moral evaluation*), dan (4) rekomendasi solusi (*treatment recommendation*). Pendekatan ini memungkinkan perbedaan konstruksi framing antara Kumparan.com dan Tempo.co dalam pemberitaan isu tambang nikel Raja Ampat. Dengan merujuk pada penelitian terkini tersebut, penggunaan model Entman dalam studi ini tidak hanya memiliki landasan teoritis klasik, tetapi juga konsistensi metodologis yang relevan dalam konteks analisis media terhadap isu pembangunan dan lingkungan di Indonesia.

Tabel 1. Daftar berita yang dianalisis

NO	KUMPARAN.COM		TEMPO.CO	
	Tanggal Terbit	Judul	Tanggal Terbit	Judul
1.	12 September 2025	“Kementerian ESDM Izinkan PT Gag Nikel Beroperasi Kembali per 3 September 2025”	10 September 2025	“Izinkan Tambang Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Pemerintah Dinilai Serakah”
2.	13 September 2025	“Populer: Pembagian Kucuran Rp 200 T; PT Gag Nikel Kembali Beroperasi”	15 September 2025	“Mengapa Kementerian ESDM Izinkan PT Gag Nikel kembali Beroperasi di Raja Ampat?”

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

Tabel 1. Menyajikan daftar berita yang dianalisis dari Kumparan.com dan Tempo.co pada periode 3 hingga 15 September 2025, bertepatan dengan mencuatnya kembali polemik izin operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat. Pemilihan dua media ini didasarkan pada perbedaan karakteristik dan orientasi redaksionalnya yang mewakili variasi *framing* dalam media arus utama nasional. Dengan demikian, tabel ini menjadi dasar bagi analisis komparatif untuk melihat bagaimana masing-masing media membingkai isu konflik ekonomi–ekologi dalam konteks kebijakan tambang nikel tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kumparan.com dan Tempo.co membingkai polemik izin operasi kembali PT Gag Nikel di Raja Ampat secara berbeda selama periode 3–15 September 2025. Rentang waktu tersebut menjadi momentum penting yang menandai munculnya kembali perdebatan publik mengenai tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan di wilayah konservasi tersebut. Melalui analisis *framing* dengan menggunakan empat elemen yang dikemukakan Entman (1993)—yakni pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, serta rekomendasi solusi—terungkap bahwa kedua media mengonstruksi realitas dengan orientasi dan penekanan yang berbeda. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa *framing* yang dibangun masing-masing media tidak hanya mencerminkan cara mereka memandang isu lingkungan dan kebijakan ekonomi, tetapi juga menunjukkan posisi ideologis serta arah redaksional yang memengaruhi pembentukan makna dalam pemberitaan.

Tabel 2. Analisis *Framing* [Kumparan.com](#) (Model Robert N. Entman)

Elemen <i>Framing</i>	Berita 1: “Kementerian ESDM Izinkan PT Gag Nikel Beroperasi Kembali per 3 September 2025”	Berita 2: “Populer: Rincian Pembagian Kucuran Rp 200 T; PT Gag Nikel Kembali Beroperasi”
		
	Gambar 1. Tangkapan layar berita Kumparan.com berjudul “Kementerian ESDM Izinkan PT Gag Nikel Beroperasi Kembali per 3 September 2025”. Sumber: Kumparan.com (2025).	Gambar 2. Tangkapan layar berita Kumparan.com berjudul “Populer: Rincian Pembagian Kucuran Rp 200 T; PT Gag Nikel Kembali Beroperasi”. Sumber: Kumparan.com (2025).

Pendefinisian masalah (<i>problem definition</i>)	Permasalahan digambarkan sebagai keputusan resmi pemerintah untuk mengizinkan kembali operasi PT Gag Nikel setelah evaluasi. Fokus masalah adalah legalitas izin dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Berita menekankan bahwa izin ini diberikan setelah tim Kementerian	Masalah utama yang dikonstruksi adalah keputusan Kementerian ESDM untuk mengizinkan kembali aktivitas tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat. Keputusan ini diposisikan sebagai kebijakan resmi negara yang menandai kelanjutan aktivitas ekonomi di sektor pertambangan.
--	---	---

ESDM dan Dirjen Minerba turun ke lapangan untuk verifikasi.

**Identifikasi
penyebab (*causal
interpretation*)**

Sebab utama diberikannya izin kembali dikaitkan dengan hasil evaluasi lapangan oleh Kementerian/Dirjen serta klaim bahwa perusahaan telah memenuhi kriteria tata kelola lingkungan (PROPER Hijau). Ada penyebutan perlunya harmonisasi regulasi dan klarifikasi terhadap status izin pertambangan.

Penyebab diletakkan pada hasil evaluasi pemerintah. Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba disebut sudah melakukan verifikasi lapangan sebelum izin dikeluarkan. Hal ini membangun kesan bahwa izin kembali diberikan karena faktor administratif dan teknis, bukan karena tekanan politik atau ekonomi semata.

**Penilaian moral
(*moral evaluation*)**

Narasi relatif mendukung atau positif terhadap keputusan tersebut. Berita menyebut bahwa perusahaan “memperhatikan lingkungan” dan memperoleh pengakuan PROPER Hijau, yang memberi penilaian moral bahwa perusahaan sudah patuh dan layak diizinkan beroperasi. Kritik terhadap dampak lingkungan kurang mendapat porsi besar dalam artikel ini.

Keputusan ESDM dipandang sah dan beralasan. Penyebutan bahwa PT Gag Nikel memperoleh PROPER Hijau memperkuat legitimasi moral bahwa perusahaan “layak” beroperasi. Dengan demikian, izin dari ESDM tidak hanya prosedural, tetapi juga bermuatan nilai kepatuhan lingkungan.

Rekomendasi solusi (<i>treatment recommendation</i>)	Solusi yang disajikan lebih berupa tindakan administratif: evaluasi lapangan, verifikasi izin, penguatan prosedur kepatuhan lingkungan. Tidak ada rekomendasi terang-terangan untuk menghentikan operasi atau kritik keras tersembunyi; lebih ke arah memastikan bahwa perusahaan memenuhi persyaratan kelembagaan dan regulasi.	Rekomendasi yang ditonjolkan adalah agar perusahaan menjalankan operasi sesuai aturan lingkungan yang lebih ketat, serta adanya penguatan pengawasan dari pemerintah. Media tidak menampilkan seruan penolakan, melainkan lebih pada perlunya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang ditetapkan ESDM.
---	--	--

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

Tabel 2. Hasil analisis *framing* terhadap Kumparan.com memperlihatkan bahwa media ini membingkai isu tambang melalui penekanan pada dimensi moral dan etika kebijakan publik. Fokus utama diarahkan pada tanggung jawab pemerintah dan korporasi dalam memastikan penanganan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat terdampak. Pola pemberitaan semacam ini memperlihatkan kecenderungan media digital untuk membangun legitimasi moral negara, bukan sekadar menekankan aspek hukum atau administratif. Hal tersebut sejalan dengan temuan (Pinontoan and Wahid 2020) yang menunjukkan bahwa media daring arus utama sering menggunakan basis frame moral dan etika dalam meliput isu kebijakan publik, dengan menonjolkan peran pemerintah sebagai aktor utama. Penonjolan penghargaan PROPER Hijau dalam teks berita juga memperlihatkan konstruksi moral bahwa pemerintah dan korporasi telah menjalankan praktik pertambangan yang “bertanggung jawab,” tanpa banyak menghadirkan pandangan kritis dari pihak oposisi.

Tabel 3. Analisis *Framing* [Tempo.co](https://www.tempo.co) (Model Robert N. Entman)

Elemen <i>Framing</i>	Berita 1: “Izinkan Tambang Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Pemerintah Dinilai Serakah”	Berita 2: “Mengapa Kementerian ESDM Izinkan PT Gag Nikel kembali Beroperasi di Raja Ampat?”
------------------------------	---	--



Gambar 3. Tangkapan layar berita Tempo.co berjudul “Izinkan Tambang Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Pemerintah Dinilai Serakah”.
Sumber: Tempo.co (2025).



Gambar 4. Tangkapan layar berita Tempo.co berjudul “Mengapa Kementerian ESDM Izinkan PT Gag Nikel Kembali Beroperasi di Raja Ampat?”.
Sumber: Tempo.co (2025).

Pendefinisian masalah (*problem definition*)

Tempo membingkai persoalan sebagai bentuk keserakahan pemerintah dan korporasi dalam mengutamakan keuntungan industri tambang dibandingkan kelestarian lingkungan Raja Ampat. Masalah utama bukan sekadar izin tambang, tetapi pengabaian terhadap keberlanjutan ekosistem laut, suara masyarakat adat, serta komitmen iklim nasional.

Masalah utama dibingkai sebagai kontroversi keputusan Kementerian ESDM yang kembali mengizinkan PT Gag Nikel beroperasi setelah sebelumnya dihentikan karena penolakan publik. Tempo memosisikan isu ini sebagai pertentangan antara kebijakan pemerintah vs kelestarian ekosistem Raja Ampat.

Identifikasi penyebab (*causal interpretation*)

Penyebab masalah ditujukan langsung kepada Kementerian ESDM dan pemerintah pusat, khususnya Menteri Bahlil Lahadalia serta rezim Prabowo yang dianggap miskin imajinasi ekonomi selain mengandalkan industri ekstraktif. Kebijakan izin operasi dikaitkan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, meski ada risiko besar terhadap lingkungan, HAM, dan masa depan ekosistem Raja Ampat.

Dalam bingkai identifikasi penyebab, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beralasan bahwa pemberian izin operasi PT Gag Nikel kembali dilakukan agar proses evaluasi dan audit lingkungan dapat berlangsung secara menyeluruh dalam kondisi operasional. Namun, perspektif berbeda muncul dari Greenpeace yang menilai keputusan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kritik ini menekankan bahwa

pemerintah terlalu bergantung pada industri ekstraktif sehingga penyebab permasalahan diposisikan ganda: di satu sisi sebagai upaya teknokratis pemerintah untuk memastikan kepatuhan lingkungan, di sisi lain sebagai dorongan ekonomi jangka pendek yang berpotensi mengorbankan kelestarian ekosistem Raja Ampat.

**Penilaian moral
(moral
evaluation)**

Tempo, melalui suara Greenpeace dan Jatam, menilai keputusan pemerintah sebagai tindakan tidak bermoral, melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, serta bentuk pengkhianatan terhadap komitmen iklim Indonesia. Secara moral, pemerintah diposisikan sebagai pihak yang mengabaikan hak masyarakat adat, mengorbankan masa depan lingkungan demi keuntungan ekonomi sesaat.

Dari sisi penilaian moral, pemerintah berupaya menampilkan diri sebagai pihak yang berhati-hati dengan menekankan pentingnya pengawasan lintas kementerian terhadap aspek lingkungan, termasuk Amdal dan reklamasi. Narasi ini memberi kesan bahwa izin operasi kembali tidak semata-mata keputusan administratif, tetapi juga berlandaskan pada pertimbangan tata kelola lingkungan. Sebaliknya, Greenpeace menilai keputusan tersebut justru merupakan bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai ekologis dan keberlanjutan, karena mengancam kehidupan masyarakat lokal sekaligus menunjukkan kemiskinan visi pembangunan berkelanjutan. Pertentangan moral ini memperlihatkan bagaimana framing dibangun untuk

menegaskan legitimasi pemerintah, namun dipatahkan oleh wacana kritik aktivis yang menekankan kerusakan ekologi dan hak masyarakat adat.

**Rekomendasi
solusi (*treatment
recommendation*)**

Solusi yang ditonjolkan adalah pencabutan izin PT Gag Nikel dan penghentian semua rencana tambang serta pembangunan smelter di Sorong dan Raja Ampat. Narasi Greenpeace menekankan bahwa melindungi Raja Ampat sama dengan melindungi kehidupan masyarakat Papua, Indonesia, bahkan dunia. Alternatif yang diusulkan bukan hanya penghentian tambang, tetapi juga pergeseran ke arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Dalam hal rekomendasi solusi, pemerintah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dokumen Amdal, pelaksanaan reklamasi, serta pemenuhan tata kelola lingkungan oleh PT Gag Nikel. Pendekatan ini diposisikan sebagai jalan tengah agar aktivitas pertambangan tetap berjalan namun berada dalam koridor regulasi. Sebaliknya, Greenpeace menawarkan solusi yang lebih radikal, yaitu mencabut izin operasi PT Gag Nikel, menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di pulau kecil, serta menolak rencana pembangunan smelter di Sorong dan Raja Ampat. Perbedaan ini menunjukkan kontras framing: pemerintah mengedepankan kelanjutan ekonomi dengan syarat kepatuhan administratif, sementara aktivis menekankan penghentian total demi melindungi ekosistem dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 08	Nomor. 01	Januari – Juni 2026
-------------------	------------	-----------	---------------------

Tabel 3. Hasil analisis *framing* terhadap Tempo.co memperlihatkan orientasi pemberitaan yang lebih kritis dan advokatif. Tempo menyoroti pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dengan menampilkan pandangan dari *Greenpeace* dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). *Framing* ini menggambarkan posisi media sebagai pengawas sosial yang mempertanyakan keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Pola tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Sulistiani and Rumangkit 2023) yang menunjukkan bahwa media lokal di Papua cenderung menyoroti isu lingkungan dengan sikap kritis terhadap pemerintah serta mendorong perhatian publik terhadap perlindungan ekosistem. Dengan demikian, Tempo.co menghadirkan *framing* tandingan yang menegaskan pentingnya keberlanjutan ekologis dan tanggung jawab moral negara dalam kebijakan lingkungan.

Tabel 4. Perbandingan *Framing* [Kumparan.com](#) dan [Tempo.co](#)

Elemen <i>Framing</i>	Kumparan.com	Tempo.co
Pendefinisian masalah (<i>problem definition</i>)	Masalah diposisikan sebagai keputusan prosedural pemerintah untuk mengizinkan kembali operasi PT Gag Nikel setelah evaluasi dan verifikasi lapangan.	Masalah dibingkai sebagai kontroversi dan keserakahan pemerintah yang lebih mementingkan tambang dibanding kelestarian ekosistem Raja Ampat.
Identifikasi penyebab (<i>causal interpretation</i>)	Penyebab izin dikaitkan dengan hasil audit, evaluasi teknis, dan kepatuhan regulasi (misalnya PROPER Hijau). Pemerintah ditampilkan sebagai pihak yang menjalankan fungsi administratif.	Penyebab diarahkan ke pemerintah dan rezim politik yang dinilai bergantung pada industri ekstraktif, mengabaikan UU No. 1/2014, serta mengesampingkan suara masyarakat dan ekologi.
Penilaian moral (<i>moral evaluation</i>)	Narasi cenderung positif dan mendukung pemerintah. Perusahaan dinilai sudah “layak” beroperasi karena memenuhi standar lingkungan, sehingga izin dianggap sah.	Keputusan pemerintah dinilai tidak bermoral, melanggar hukum, mengorbankan masyarakat lokal, dan mengkhianati komitmen iklim global. Pemerintah diposisikan pro-kapital tambang

Rekomendasi solusi <i>(treatment recommendation)</i>	Rekomendasi: perusahaan wajib tetap mematuhi aturan lingkungan, audit berkelanjutan, dan pengawasan ketat dari pemerintah.	Rekomendasi: cabut izin PT Gag Nikel, hentikan seluruh rencana tambang dan smelter, serta beralih ke pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis lingkungan dan masyarakat.
--	--	--

Sumber: Hasil olahan penulis (2025)

Tabel 4. Hasil perbandingan antara kedua media menunjukkan bahwa Kumparan.com cenderung memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah melalui bingkai prosedural, sedangkan Tempo.co menegaskan kritik terhadap kebijakan ekstraktif melalui bingkai moral dan ekologis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa media di Indonesia tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi, tetapi juga dalam membentuk cara pandang publik terhadap hubungan antara kebijakan pemerintah dan keberlanjutan lingkungan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Kumparan.com dan Tempo.co membangun konstruksi realitas yang berbeda dalam memaknai isu izin operasi kembali PT Gag Nikel di Raja Ampat. Perbedaan tersebut tercermin dalam cara kedua media mendefinisikan persoalan, menentukan faktor penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi terhadap konflik yang terjadi. Dalam perspektif konstruktivisme, realitas yang diterima publik bukanlah sesuatu yang hadir secara objektif, melainkan hasil dari proses seleksi, penekanan, dan interpretasi yang dilakukan media. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai tambang nikel di Raja Ampat tidak dapat dipandang sebagai representasi fakta semata, tetapi juga sebagai hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh orientasi dan kepentingan redaksional masing-masing media.

Berdasarkan analisis model framing Entman (1993), Kumparan.com cenderung memosisikan polemik tambang sebagai persoalan tata kelola dan legalitas kebijakan. Fokus pemberitaan diarahkan pada proses evaluasi yang dilakukan pemerintah, verifikasi lapangan, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Penekanan terhadap hasil evaluasi Kementerian ESDM dan capaian PROPER Hijau membentuk citra bahwa PT Gag Nikel telah memenuhi standar yang ditetapkan sehingga layak melanjutkan operasionalnya. Dalam konteks ini, pemerintah direpresentasikan sebagai aktor yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan secara rasional berdasarkan prosedur yang berlaku. Akibatnya, konflik ekonomi–ekologi lebih dipahami sebagai persoalan administratif yang dapat diselesaikan melalui penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Di sisi lain, Tempo.co menghadirkan konstruksi yang lebih kritis dengan menempatkan isu tambang dalam kerangka pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Pemberitaan Tempo.co tidak hanya menyoroti aspek kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas bagi suara organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat sipil. Melalui pendekatan tersebut, persoalan tambang dipahami sebagai ancaman terhadap ekosistem Raja Ampat, hak-hak masyarakat lokal, serta komitmen pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, sumber permasalahan tidak hanya dikaitkan dengan aspek teknis perizinan, melainkan juga dengan orientasi pembangunan yang dinilai terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Perspektif ini menghasilkan penilaian moral yang lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong munculnya tuntutan perlindungan lingkungan yang lebih kuat.

Perbedaan cara pandang kedua media tersebut mengindikasikan adanya kontestasi wacana mengenai arah pembangunan yang ideal. Kumparan.com lebih merepresentasikan pendekatan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan legitimasi kebijakan negara, sedangkan Tempo.co lebih dekat dengan perspektif pembangunan berkelanjutan yang menempatkan aspek ekologis sebagai pertimbangan utama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fakta yang sama dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda ketika disajikan melalui sudut pandang redaksional yang berbeda pula.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Devan Fairuz Insani and Ahmad Zamzamy 2023) yang menemukan adanya variasi framing dalam pemberitaan isu lingkungan dan pembangunan nasional pada media daring Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap media memiliki kecenderungan tertentu dalam menyoroti peran pemerintah, risiko ekologis, maupun strategi mitigasi lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara. Kesamaan pola tersebut menguatkan asumsi bahwa perbedaan framing merupakan konsekuensi dari karakteristik, ideologi, dan orientasi redaksional yang dimiliki masing-masing media.

Implikasi dari hasil ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi model *framing* Entman dalam konteks komunikasi lingkungan di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya perspektif ideologi media dalam membaca konstruksi wacana digital kontemporer. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan bagi jurnalis dan pengelola media untuk menerapkan prinsip keberimbangan dan tanggung jawab sosial dalam meliput isu lingkungan, agar media berperan aktif mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana ditegaskan oleh (Wijayanto and Nurhajati 2019).

Secara teoritis, hasil penelitian ini semakin menegaskan relevansi model framing Entman dalam mengkaji konstruksi media terhadap isu lingkungan. Analisis framing tidak hanya mampu mengidentifikasi aspek yang ditonjolkan media, tetapi juga menjelaskan bagaimana proses pembentukan makna berlangsung dalam pemberitaan. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya keberimbangan informasi dalam peliput isu lingkungan. Media diharapkan tidak hanya berfokus pada kepentingan ekonomi atau kepentingan ekologis semata, tetapi mampu menghadirkan berbagai perspektif secara proporsional sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan yang terjadi.

Dengan demikian, pemberitaan mengenai izin operasi kembali PT Gag Nikel di Raja Ampat memperlihatkan bahwa media massa berfungsi sebagai arena pertarungan wacana antara kepentingan pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Perbedaan framing yang muncul dalam Kumparan.com dan Tempo.co menegaskan bahwa proses produksi berita selalu dipengaruhi oleh nilai, perspektif, serta orientasi yang dianut oleh masing-masing media.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *framing* media dalam pemberitaan izin operasi kembali PT Gag Nikel di Raja Ampat menunjukkan perbedaan konstruksi yang mencerminkan orientasi ideologis masing-masing media. Kumparan.com membingkai isu tambang sebagai kebijakan administratif dan legalitas negara, sedangkan Tempo.co mengonstruksi isu tersebut sebagai problem moral dan ekologis. Temuan ini memperkuat teori *framing* Entman (1993) tentang seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dalam pembentukan makna publik. Hasil serupa ditemukan pula oleh (Astuti, Inayah, and Dahana 2024) yang menunjukkan bahwa pemberitaan media digital di Indonesia tentang krisis lingkungan masih memiliki resonansi yang lemah. Media cenderung menampilkan isu iklim secara dangkal dan bergantung pada momentum politik, sehingga belum sepenuhnya berperan sebagai ruang komunikasi ekologis yang mendorong kesadaran publik.

Implikasi teoritis dari penelitian ini memperlihatkan bahwa analisis *framing* masih relevan digunakan untuk membaca hubungan antara media dan wacana pembangunan berkelanjutan. Model Entman terbukti mampu menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap kebijakan lingkungan melalui proses seleksi dan penonjolan isu. Pendekatan ini menegaskan bahwa representasi media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga mengonstruksi makna sosial yang memengaruhi cara publik memahami persoalan ekologis. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya media menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab ekologis, sebagaimana disarankan oleh (Wijayanto and Nurhajati 2019) dalam kajian peran media terhadap pencapaian SDGs.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah dan rentang waktu data yang terbatas, serta belum melibatkan dimensi resepsi audiens. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas data dengan melibatkan lebih banyak media nasional maupun lokal, menggunakan rentang waktu lebih panjang, serta mengombinasikan pendekatan framing dengan analisis wacana kritis atau resepsi khalayak. Dengan demikian, riset lanjutan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media di Indonesia memaknai isu lingkungan dan kekuasaan dalam ruang digital.

E. DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Erika Febri, Fitriana Inayah, and Abyzan Syahadin Bagja Dahana. 2024. "Resonance of Climate Crisis News Discourse in Indonesian Online Media: Reflections on Niklas Luhmann's Ecological Communication Theory Perspective." *CHANNEL: Jurnal Komunikasi* 12(1):66–75. doi:10.12928/channel.v12i1.687.

Atong, Petrus. 2025. "RAJA AMPAT DALAM PERSIMPANGAN: DILEMA

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 08	Nomor. 01	Januari – Juni 2026
-------------------	------------	-----------	---------------------

- PEMBANGUNAN.” (September):363–73.
- Devan Fairuz Insani, and Ahmad Zamzamy. 2023. “Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia.Com Dan Kompas.Com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3:2981–93. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3806>.
- Diva Khairunnisa, Aliefia Shatila, and Muhammad Sarjan. 2025. “Hubungan Kebutuhan Manusia Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Analisis Kegiatan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia.” *Lambda Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya* 5(1):127–32. doi:10.58218/lambda.v5i1.1209.
- Dwita, Adelia Shinta, Gunawan Wisnu Pramudya, and Ade Irma Sukmawati. 2023. “Analisis Framing Murray Edelman Dalam Berita ‘Dampak PT. Medco Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang’ Pada Media AJNN.Net.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi* 7(2):88–101. doi:10.56873/jimik.v7i2.290.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hafidli, Muhammad Nabil, Rianne Nur, Dwi Lestari, Luthfiah Nurazhari, Nazma Rahisa, Gumilang Putri, and Communication Science. 2023. “ANALISIS FRAMING MODEL ROBERT ENTMAN TENTANG KASUS.” 3(1):178–83.
- Media, Kecenderungan, Pembimbingan Media, Raja Ampat, and Tambang Nikel. 2025. “SENAKOM: Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.” 3(1):1–15.
- Nuri, Afrizal Tjoetra, and Yuhdi Fahrimal. 2024. “Analisis Framing Pada Media Detikcom Dan CNN Indonesia Terhadap Pemberitaan Konflik Pulau Rempang.” *Jurnal Publish (Basic and Applied Research Publication on Communications)* 3(1):1–19. doi:10.35814/publish.v3i1.6041.
- Pinontoan, Nexen Alexandre, and Umaimah Wahid. 2020. “Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di.” *Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi* 12(1):11–24.
- Putra, Donyarto Yori. 2025. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pertambangan Nikel Di Pulau Gag Raja Ampat.” 6:446–53.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, Dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiani, Indah, and Olivian Rumangkit. 2023. “Analisis Framing Isu Lingkungan Pada Media Online Di Papua Framing Analysis Of Environmental Issues In Online Media In Papua.” *Jurnal Komunikasi Korporasi Dan Media* IV(1):28–37. www.ceposoline.com.
- Syakra, Nur Alya, Shima Kirana Abdoe, Ariqah Nurul, and Mutia Bakri. 2025. “Komoditas Menjadi Komodifikasi : Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Pertambangan Nikel Di Raja Ampat.” 1(5):588–601.
- Wijayanto, Xenia Angelica, and Lestari Nurhajati. 2019. “Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pencapaian Keberhasilan SDGs Indonesia.” *LUGAS Jurnal Komunikasi* 3(1):14–23. doi:10.31334/ljk.v3i1.409.